

2024

RENJA (RENCANA KERJA)





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Disamping itu juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan SKPD dari perencanaan sebelumnya untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Perubahan Renja (Renja) Perangkat Daerah yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan yang mencakup tahap perumusan rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan tahap penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng (PUTR) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) PUTR Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada rencana program prioritas pada



rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022. Penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Kabupaten Buleleng yang disusun ke dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PUTR Kabupaten Buleleng selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) PUTR Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



11. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007/SJ/, tanggal 12 Januari 2007 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP dan RPJM Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
14. Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali Tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
16. Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 tentang
18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2022 dimaksudkan untuk menentukan arah dan tujuan Pelaksanaan Pembangunan sector Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang, Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan tahun 2022 adalah :

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja penyusunan rencana program /kegiatan.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.
3. Memudahkan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang : mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L, dan Renja SKPD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- B. Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- C. Maksud dan Tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
- D. Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- A. Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan : memuat tentang realisasi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target, memenuhi target dan melebihi target.
- B. Analisis Target Pencapaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan : memuat tentang faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD : memuat tentang isu – isu strategis yang mempengaruhi kinerja SKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng serta telaahan terhadap kebijakan nasional dan penjabaran kegiatan Dinas yang disajikan dalam bentuk tabel.



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang perbandingan target dan keuangan rencana kerja induk dengan perubahan yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II

TA. 2022

2.1 Evaluasi Rencana Kerja

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 tetap mengacu pada pencapaian indikator program yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 maupun dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2022 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 81.100.576.325,00 dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp. 12.648.352.000,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp. 22.262.095.882,00, dan belanja modal sebesar Rp. 33.669.164.618,00 untuk melaksanakan 10 program yang dijabarkan dalam 18 kegiatan dan 51 Sub kegiatan. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Berikut pada tabel 2.1 akan diuraikan pencapaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II.



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2016)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2017)	
			Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1.03	PUTR							
1.03.01	DINAS PUTR							
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Kinerja SKPD	100%	97.70%	97.70%	100%	17,33	17,33



1.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95%	95%	100%	95%	16,20	16,20
1.03.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	1,42	15,79
1.03.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	0,50	16,65
1.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	18,59	18,59
1.03.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177 Orang	177 Orang	100%	177 Orang	34,00	18,69
1.03.01.2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	1,6	13,22



1.03.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Bulan	100%	12 Dokumen	1,8	15,27
1.03.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	1	9,64
1.03.01.2.03.06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	1	9,64
1.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	83.91%	83.91%	100%	8,16%	8,16
1.03.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun		-
1.03.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	-	3.67 Jenis	367%	-	-	



1.03.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	0,25	2,07
1.03.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	3.82 Jenis	95,50%	4 Jenis	0,26	6,58
1.03.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	0,20	3,90
1.03.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Jenis	6 Jenis	100%	6 Jenis	0,94	15,73
1.03.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	0,20	20,41
1.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	0%	0



1.03.01.2.07.01	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
1.03.01.2.07.03	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	1 Unit	1 Unit	100%	-	-	-
1.03.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100%	200	0	0
1.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	18%	14,96
1.03.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500 Lembar	4000 Lembar	100%	4500 Lembar	713	15,84
1.03.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Rekening	36 Rekening	100%	36 Rekening	7,14	19,85



1.03.01.2.08.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	0,33	16,67
1.03.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Jenis	29 Jenis	100%	29 Jenis	3,22	11,12
1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	23%	9,14
1.03.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	0,01	1,45
1.03.01.2.09.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0,64	12,82
1.03.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	0,05	4,77



01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastruktur Pengairan yang Mantap	78.24%	75.28%	96,22%	78.56%	10,45%	4,97
1.03.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten yang efektif	100%	100%	100%	100%	11,53%	11,53
1.03.02.2.01.04	Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Kabupaten	1 Kabupaten	100%	1 Kabupaten	0,12	11,53
1.03.02.2.02	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik	78.24%	78.24%	100%	78.56%	9,36%	4,83
1.03.02.2.02.08	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	78.24%	78.24%	100%	78.56%	12,73	16,21



1.03.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	78.24%	78.24%	100%	78.56%	0,96	1,22
1.03.02.2.02.21	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	78.24%	78.24%	100%	78.56%	10,45	13,31
1.03.02.2.02.22	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	78.24%	78.24%	100%	78.56%	13,30	16,93
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Capaian Pelayanan Air Minum	86.74%	86.74%	100%	87%	12,33%	14,17
1.03.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	86.74%	86.74%	100%	87%	12,33%	14,17



1.03.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	0	-
1.03.03.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	3 SPAM	3 SPAM	100%	3 SPAM	0,41	13,81
1.03.03.2.01.11	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15 PAM Desa	15 PAM Desa	100%	15 PAM Desa	2,22	14,77
1.03.03.2.01.14	Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	2 Desa	2 Desa	100%	2 Desa	0	-
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	37.21%	37.21%	100%	41.86%	1,40%	3,35



1.03.04.2.01	Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Daerah Kabupaten/Kota	37.21%	37.21%	100%	41.86%	1,40%	3,35
1.03.04.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	0	-
1.03.04.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	5 Desa	5 Desa	100%	41.86%	1,40	3,35
1.03.04.2.01.04	Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	5 Desa	5 Desa	100%	5 unit	0	-
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pelayanan Air Limbah	94%	94%	100%	94.46	11,72%	12,41
1.03.05.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sitem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	94%	94%	100%	94.46	11,72%	12,41



1.03.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	-
1.03.05.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sitem Pengolahan Setempat	-	100 KK	100 KK	100%	475 KK	0	-
1.03.05.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2 Wilayah	2 Wilayah	100%	17 wilayah	0	-
1.03.05.2.01.14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	150 KK	150 KK	100%	200 Unit	25	12,41
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Saluran Drainase dalam kondisi baik	47.67%	47.67%	100%	48.27%	11,88%	11,88



1.03.06.2.01	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Saluran Drainase dalam kondisi baik	47.67%	47.67%	100%	48.27%	11,88%	11,88
1.03.06.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	-
1.03.06.2.01.06	Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	47.67%	47.67%	100%	48.27%	0	-
1.03.06.2.01.09	Sub Kegiatan Operasi Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	48.31%	48.31%	100%	51.33%	6	11,88
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	8,83%	8,83



1.03.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	8,83%	8,83
1.03.08.2.01.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, Serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100%	100%	10%	10,00
1.03.08.2.01.02	Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	11%	0,11
1.03.08.2.01.04	Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	16,37%	16,37
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan yang mantap	71.2%	71.2%	100,00%	72%	4,61	4,61



1.03.10.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	71.2%	71.2%	100,00%	72%	4,61	4,61
1.03.10.2.01.04	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	72%	5,50	7,64
1.03.10.2.01.08	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	2 Ruas	2 Ruas	100%	72%	0,85	1,18
1.03.10.2.01.09	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 Ruas	3 Ruas	100%	72%	0,07	0,10
1.03.10.2.01.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	10 Km	10 Km	100%	72%	10,14	14,09
1.03.10.2.01.12	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	1 Buah	1 Buah	100%	72%	0,01	0,02



1.03.10.2.01.16	Sub Kegiatan Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1 Buah	1 Buah	100%	72%	0,00	-
1.03.10.2.01.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1 Buah	1 Buah	100%	72%	0,00	-
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Terampil	100%	98.31%	98.31%	100%	2,04	2,04
1.03.11.2.04	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang tunduk terhadap peraturan yang berlaku	100%	98.31%	98.31%	100%	2,04	2,04
1.03.11.2.04.03	Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kab/Kota	100%	98.31%	98.31%	100%	2,04%	2,04



1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang	60%	60%	100%	70%	6,84	9,77
1.03.12.2.01	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Regulasi Tata Ruang	60%	60%	100%	70%	8,94	8,94
1.03.12.2.01.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	70%	11,78	16,83
1.03.12.2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	70%	0,74	1,06
1.03.12.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang selaras	60%	60%	100%	70%	11,45	11,45



1.03.12.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	70%	2,79	3,99
1.03.12.2.02.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	70%	13,23	18,90
1.03.12.2.04	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	100%	100%	100%	100%	12,73%	12,73
1.03.12.2.04.04	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	9 Kecamatan	9 Kecamatan	100%	100%	12,73%	12,73



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dengan capaian Dinas PUTR Kabupaten Buleleng pada Tahun Anggaran 2022 dengan Pagu Rp. 81.100.576.325,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.093.110.947,00. Dilihat dari realisasi anggaran terhadap pagu anggaran maka capaian keuangan sebesar 86,43% dan kinerja sebesar 96,06%. Capaian tersebut disebabkan seperti penjabaran sebagai berikut :

A) Program Penunjang

Program Penunjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kabupaten Buleleng terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.208.959.820,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 15.735.023.163,00 atau 97,08 %. Dengan Capaian 97,70% , yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.208.959.820,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 15.735.023.163,00 atau 97,08% dengan Capaian 97,70%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 332.086.860,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 322.236.344,00 atau 97,03% dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah Dokumen RKA, RDPA, DPA dan DPPA Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 174.414.710,00, realisasi Rp. 171.681.883,00 atau 98,43%. Dengan target 6 Dokumen, dengan realisasi (output) 6 Dokumen atau 100%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang dilaporkan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.672.150,00 realisasi Rp. 150.554.461,00 atau 95,49%. Dengan target 6 Dokumen, dengan realisasi (output) 6 Dokumen atau 100%.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 13.349.481.095,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 13.115.049.362,00 atau 98,24%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.055.661.855,00 realisasi Rp. 12.824.423.231,00 atau 98,23%. Dengan target 12 Bulan, dengan realisasi (output) 12 Bulan atau 100%.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian alokasi anggaran sebesar Rp. 156.449.490,00 realisasi Rp. 153.663.627,00 atau 98,22%. Dengan target 6 dokumen, dengan realisasi (output) 6 dokumen atau 100%.
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen administrasi keuangan daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 137.369.750,00 realisasi Rp. 136.962.504,00 atau 99,70%. Dengan target 12 bulan, dengan realisasi (output) 12 bulan atau 100%.
- 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 98.403.470,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 98.261.636,00 atau 99,86%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 98.403.470,00 realisasi Rp. 98.261.636,00 atau 99,86%. Dengan target 5 jenis, dengan realisasi (output) 5 jenis atau 100%.
- 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.273.792,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 504.732.846,00 atau 91,72%, dengan capaian 83,91%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 7 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp. 9.084.600,00 realisasi Rp. 8.771.220,00 atau 96,55%. Dengan target 12 bulan, dengan realisasi (output) 12 bulan atau 100%.
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran Rp. 73.615.136,00 realisasi Rp. 67.521.300,00 atau 91,72%. Dengan target 4 jenis, dengan realisasi (output) 4 jenis atau 100%.
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah bahan logistik kantor yang menunjang kegiatan perangkat daerah alokasi anggaran



sebesar Rp.330.039.305,00 realisasi Rp. 316.255.944,00 atau 95,82%. Dengan target 12 bulan, dengan realisasi (output) 12 bulan atau 100%.

- d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.008.315,00 realisasi Rp. 17.395.458,00 atau 62,11%. Dengan target 4 jenis, dengan realisasi (output) 3,82 jenis atau 95,54%.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan dengan indikator Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.700.000,00 realisasi Rp. 2.361.500,00 atau 87,46%. Dengan target 5 jenis, dengan realisasi (output) 5 jenis atau 100%.
- f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman alokasi anggaran sebesar Rp. 33.922.800,00 realisasi Rp. 31.187.600,00 atau 91,94%. Dengan target 6 jenis, dengan realisasi (output) 6 jenis atau 100%.
- g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 72.903.636,00 realisasi Rp. 61.239.824,00 atau 84,00%. Dengan target 12 bulan, dengan realisasi (output) 12 bulan atau 100%.

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 271.689.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 190.886.527,00 atau 70,26%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.219.000,00 realisasi Rp. 31.900.000,00 atau 99,01%. Dengan target 1 unit, dengan realisasi (output) 1 unit atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar dengan indikator Jumlah Pengadaan Alat Besar alokasi anggaran sebesar Rp. 235.470.000,00 realisasi Rp. 154.990.527,00 atau 65,82%. Dengan target 1 unit, dengan realisasi (output) 1 unit atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan dengan indikator Jumlah Mebel alokasi anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 realisasi Rp. 3.996.000,00 atau 99,90%. Dengan target 2 unit, dengan realisasi (output) 2 unit atau 100%.



1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 882.412.590,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 848.911.000,00 atau 96,20%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator Jumlah Surat yang Dikirim alokasi anggaran sebesar Rp. 81.394.500,00 realisasi Rp. 81.242.323,00 atau 99,81%. Dengan target 4.000 lembar, dengan realisasi (output) 4.000 lembar atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jenis Rekening Telepon, Air dan Listrik yang Terbayar alokasi anggaran sebesar Rp. 216.000.000,00 realisasi Rp. 185.543.210,00 atau 85,90%. Dengan target 12 bulan, dengan realisasi (output) 12 bulan atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah sarana mobilitas darat yang disewa alokasi anggaran sebesar Rp. 257.576.580,00 realisasi Rp. 256.785.271,00 atau 99,69%. Dengan target 2 jenis, dengan realisasi (output) 2 jenis atau 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah penyediaan alat tulis kantor Jumlah sarana dan prasarana kebersihan kantor alokasi anggaran sebesar Rp. 327.441.510,00 realisasi Rp. 325.340.196,00 atau 99,36%. Dengan target 12 bulan, dengan realisasi (output) 12 bulan atau 100%.

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 724.613.013,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 654.945.448,00 atau 90,39%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayar alokasi anggaran sebesar Rp. 137.970.000,00 realisasi Rp. 117.021.377,00 atau 84,82%. Dengan target 1 tahun, dengan realisasi (output) 1 tahun atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan indikator Jumlah Alat Besar yang dipelihara alokasi anggaran sebesar Rp. 467.113.013,00 realisasi Rp. 428.264.396,00 atau 91,68%. Dengan target 5 unit, dengan realisasi (output) 5 unit atau 100%.



- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah pemeliharaan sarana perlengkapan kantor alokasi anggaran Rp. 119.530.000,00 realisasi Rp. 109.659.675,00 atau 91,74%. Dengan target 1 tahun, dengan realisasi (output) 1 tahun atau 100%.

B. Program Utama

Sedangkan pada Program Utama pada Urusan Pekerjaan umum terdiri terdiri dari 9 Program, 12 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 899.841.622,00, realisasi anggaran sebesar Rp. 883.509.056,00 atau 98,18%. Dengan Capaian 98,69%, yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.1.514.882.530,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.504.161.253,00 atau 99,29%, dengan capaian 75,28%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

- 1.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.107.380.980,00 realisasi keuangan sebesar Rp.107.221.196,00 atau 99,85%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten alokasi anggaran sebesar Rp.107.380.980,00 realisasi Rp.107.221.196,00 atau 99,85%. Dengan target 1 kabupaten, dengan realisasi (output) 1 kabupaten atau 100%.

- 1.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.407.501.550,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.396.940.057,00 atau 99,25%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan kualitasnya alokasi anggaran sebesar Rp. 133.646.969,00 realisasi Rp. 133.604.173,00 atau 99,97%. Dengan target 1 kabupaten, dengan realisasi (output) 1 kabupaten atau 100%.



- b) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator Jumlah jaringan irigasi yang terehabilitasi alokasi anggaran sebesar Rp. 443.479.179,00 realisasi Rp. 435.200.041,00 atau 98,18%. Dengan target 1 kabupaten, dengan realisasi (output) 1 kabupaten atau 100%.
 - c) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan indikator Jumlah operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan alokasi anggaran sebesar Rp.311.148.900,00 realisasi Rp. 310.139.650,00 atau 99,68%. Dengan target 1 kabupaten, dengan realisasi (output) 1 kabupaten atau 100%.
 - d) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi dengan indikator Jumlah operasi dan pemeliharaan bendung irigasi permukaan alokasi anggaran sebesar Rp.519.226.502,00 realisasi Rp. 517.996.193,00 atau 99,76%. Dengan target 1 Kabupaten, dengan realisasi (output) 1 Kabupaten atau 100%.
- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.943.081.788,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 5.262.120.803,00 atau 88,54%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :
- 2.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.943.081.788,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 5.262.120.803,00 atau 88,54%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan teknis spam alokasi anggaran sebesar Rp. 146.510.410,00, realisasi Rp. 145.420.127,00 atau 99,26%. Dengan target 10 dokumen dengan realisasi (output) 10 Dokumen atau 100%.
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dengan indikator Jumlah SPAM terbangun alokasi anggaran sebesar Rp. 5.750.945.003,00, realisasi Rp. 5.071.669.876,00 atau 88,19%. Dengan target 10 SPAM dengan realisasi (output) 10 SPAM atau 100%.
 - c) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat dengan indikator Jumlah Pembinaan dan Penataan Manajemen Pengelolaan SPAM Perdesaan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.514.375,00, realisasi Rp. 16.432.800,00 atau 99,51%. Dengan target 15 PAM Desa dengan realisasi (output) 15 PAM Desa atau 100%.



- d) Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM dengan indikator Jumlah Desa Terfasilitasi Pembangunan/Pengembang an SPAM dari Pemerintah Pusat alokasi anggaran sebesar Rp. 29.112.000,00, realisasi Rp. 28.598.000,00 atau 98,23%. Dengan target 27 Desa dengan realisasi (output) 27 Desa atau 100%.
- 3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.605.627.780,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.602.728.630,00 atau 99,89%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :
- 3.1 Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.605.627.780,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.602.728.630,00 atau 99,89%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sitem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator Rancangan kebijakan pengelolaan persampahan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.435.000,00, realisasi Rp.17.310.550,00 atau 99,29%. Dengan target 1 dokumen dengan realisasi (output) 1 dokumen atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3 R/TPS dengan indikator Terbangunnya PDU Terbangunnya Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS tersedianya lahan untuk pembangunan TPA alokasi anggaran sebesar Rp.2.576.693.005,00, realisasi Rp. 2.573.924.400,00 atau 99,89%. Dengan target 5 Desa dengan realisasi (output) 5 Desa atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3 R/TPS dengan indikator Terpeliharanya Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS alokasi anggaran sebesar Rp. 11.499.775,00, realisasi Rp. 11.493.680,00 atau 99,95%. Dengan target 5 Desa dengan realisasi (output) 5 Desa atau 100%.
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.688.785.445,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.677.143.030,00 atau 99,57%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :



4.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.688.785.445,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.677.143.030,00 atau 99,57%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Pengelolaan Air Limbah alokasi anggaran sebesar Rp. 2.150.000,00, realisasi Rp. 2.099.900,00 atau 97,67%. Dengan target 3 Dokumen dengan realisasi (output) 3 Dokumen atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat dengan indikator Jumlah Pembangunan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Setempat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.460.860.640,00, realisasi Rp. 2.459.204.040,00 atau 99,93%. Dengan target 100 KK dengan realisasi (output) 100 KK atau 100%.
- c) Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman dengan indikator Jumlah terbangunnya saluran drainase perkotaan alokasi anggaran Rp. 2.148.875,00, realisasi Rp. 2.123.900,00 atau 98,84%. Dengan target 2 wilayah dengan realisasi (output) 2 wilayah atau 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja dengan indikator Jumlah Prasarana Air Limbah Terpelihara alokasi anggaran sebesar Rp. 223.625.930,00, realisasi Rp. 213.715.190,00 atau 95,57 %. Dengan target 150 KK dengan realisasi (output) 150 KK atau 100%.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.219.416.194,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.190.708.656,00 atau 98,71%, dengan capaian 100%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

5.1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.219.416.194,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 2.190.708.656,00 atau 98,71%, dengan capaian 100%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :



- a) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Drainase Perkotaan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.186.375,00, realisasi Rp. 2.123.900,00 atau 97,14%. Dengan target 3 Dokumen dengan realisasi (output) 3 Dokumen atau 100%.
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dengan indikator Persentase sistem drainase yang efektif alokasi anggaran sebesar Rp. 133.648.875,00, realisasi Rp. 129.696.900,00 atau 97,04%. Dengan target 54,84% dengan realisasi (output) 54,84% atau 100%.
 - c) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase dengan indikator Jumlah Kawasan Drainase Terpelihara alokasi anggaran sebesar Rp. 2.083.580.944,00, realisasi Rp. 2.058.887.856,00 atau 98,81%. Dengan target 15 kawasan dengan realisasi (output) 15 kawasan atau 100%.
- 6) Program Penataan Bangunan Gedung, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 9.569.691.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 8.590.192.424,00 atau 89,76%, dengan capaian 98,87%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :
- 6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 9.569.691.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp 8.590.192.424,00 atau 89,76%, dengan capaian 98,87%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan indikator Jumlah Rekomendasi Keandalan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung alokasi anggaran sebesar Rp. 244.110.000,00 realisasi Rp. 232.691.025,00 atau 95,32%. Dengan target 10 Rekomendasi dengan realisasi (output) 10 Rekomendasi atau 100%.
 - b) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Bangunan Gedung Negara Yang Terbangun alokasi anggaran sebesar Rp.



9.223.780.000,00 realisasi Rp. 8.256.225.552,00 atau 89,51%. Dengan target 2 Paket dengan realisasi (output) 1,94 Paket atau 96,90%.

- c) Sub Kegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Layanan Bantuan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara alokasi anggaran sebesar Rp. 101.801.000,00 realisasi Rp. 101.275.847,00 atau 86,14 %. Dengan target 12 bulan dengan realisasi (output) 11,97 bulan atau 99,72%.

- 7) Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.39.450.290.146,00 realisasi keuangan sebesar Rp 30.647.523.932,00 atau 77,69%, dengan capaian 96,67%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

- 7.1 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 39.450.290.146,00 realisasi keuangan sebesar Rp.30.647.523.932,00 atau 77,69%, dengan capaian 96,67%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 6 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan indikator Jumlah Data Kondisi Jalan dan Jembatan alokasi anggaran sebesar Rp 264.440.000,00, realisasi Rp.256.871.247,00 atau 97,14%. Dengan target 2 Paket dengan realisasi (output) 1,98 Paket atau 99,08%.
- b) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan indikator Jumlah Jalan yang Terekonstruksi alokasi anggaran sebesar Rp 12.188.541.000,00, realisasi Rp.8.457.940.405,00 atau 69,39%. Dengan target 2 Ruas dengan realisasi (output) 1,79 Ruas atau 89,28%.
- c) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan indikator Jumlah Jalan yang terehabilitasi alokasi anggaran sebesar Rp 19.558.640.686,00, realisasi Rp 15.126.093.414,00 atau 77,34%. Dengan target 3 Ruas dengan realisasi (output) 2,77 Ruas atau 92,17%.
- d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan indikator Panjang Jalan Kabupaten yang Terpelihara alokasi anggaran sebesar Rp.3.614.740.000,00, realisasi Rp 2.982.690.406,00 atau 82,51%. Dengan target 10 Km dengan realisasi (output) 9,95 Km atau 99,46%.
- e) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan indikator Jumlah Jembatan yang Terbangun alokasi anggaran sebesar Rp 3.248.238.840,00, realisasi Rp



3.248.238.840,00 atau 100%. Dengan target 1 Buah dengan realisasi (output) 1 Buah atau 100%.

- f) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan indikator Jumlah jembatan yang terehabilitasi alokasi anggaran sebesar Rp. 575.689.620,00, realisasi Rp. 575.689.620,00 atau 100 %. Dengan target 1 Buah dengan realisasi (output) 1 Buah atau 100%.
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 155.059.915,00 realisasi keuangan sebesar Rp 152.446.904,00 atau 98,31%, dengan capaian 98,31%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :
- 8.1 Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 155.059.915 realisasi keuangan sebesar Rp. 152.446.904 atau 98.31%, dengan capaian 98.31%) Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan indikator Persentase kegiatan pembangunan yang dalam Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi alokasi anggaran sebesar Rp. 155.059.915,00 realisasi Rp. 152.446.904,00 atau 98,31%. Dengan target 1 Tahun dengan realisasi (output) 0,98 Tahun atau 98,31%.
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 744.781.707,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 731.062.152,00 atau 98,16%, dengan capaian 99,07%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :
- 9.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 173.966.449,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 169.732.893,00 atau 97,57%, dengan capaian 98,56%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 146.203.579,00 realisasi Rp.



141.971.022,00 atau 97,11%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (output) 1 Dokumen atau 100%.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 27.762.870,00 realisasi Rp. 27.761.870,00 atau 100%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (output) 1 Dokumen atau 100%.

9.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 384.745.723,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 378.349.461,00 atau 98,34%, dengan capaian 99,94%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 147.453.240,00 realisasi Rp. 142.027.869,00 atau 96,32%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (output) 1 Dokumen atau 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp.237.292.483,00 realisasi Rp. 236.321.592,00 atau 99,59%. Dengan target 1 Dokumen dengan realisasi (output) 1 Dokumen atau 100%.

9.3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 186.069.535,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 182.979.798,00 atau 98,34%, dengan capaian 98,70%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan indikator Persentase Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang alokasi anggaran sebesar Rp. 186.069.535,00 realisasi Rp. 182.979.798,00 atau 97,81%. Dengan target 9 Kecamatan dengan realisasi (output) 9 Kecamatan atau 98,70%.



Untuk capaian Triwulan I Tahun Anggaran 2023 dengan Pagu Rp. 72.074.027.247,00 realisasi anggarannya adalah sebesar Rp. 4.388.648.708,00. Dilihat dari realisasi anggaran terhadap pagu anggaran maka capaian keuangan sebesar 6,09% dan kinerja sebesar 9,11%. Capaian tersebut disebabkan karena pada Triwulan I Tahun Anggaran 2023 yang berjalan hanya kegiatan rutin dan operasional rutin saja, sedangkan untuk kegiatan fisik baru pada tahap proses lelang, sehingga serapan atau capaian anggaran maupun kinerja masih rendah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal



berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut :

A. Isu – Isu Strategis :

1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

- a. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan belum optimalnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
- b. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur pengairan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor.
- c. Mempertahankan kemampuan penyediaan air untuk irigasi dari sumber-sumber air yang semakin berkurang sebagai dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.
- d. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan pengairan untuk mengurangi konflik antar pengguna sumber daya air.
- e. Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur pengairan.

2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

- a. Mulai banyaknya titik kepadatan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan Singaraja, yaitu jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pendidikan.
- b. Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas jalan bagian timur dan bagian barat Kabupaten Buleleng yang dilalui oleh mobil-mobil truk pengangkut galian C.
- c. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di kawasan perbatasan Kabupaten Buleleng bagian selatan.
- d. Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
- e. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang



manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

- a. Meningkatkan cakupan terhadap akses air minum sesuai dengan target Universal Access yaitu 100% akses di tahun 2019
- b. Menyediakan produk hukum terutama regulasi pemanfaatan air minum terutama untuk sistem perdesaan terkait pembagian antara kebutuhan air minum dan pertanian.
- c. Belum optimalnya penerapan Perda Kabupaten Buleleng No. 1 tahun 2013 tentang persampahan dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara saluran-saluran drainase jalan sehingga sering terjadinya penyumbatan pada saluran drainase yang mengakibatkan meluapnya air ke permukaan pada saat musim hujan.

4. Isu Strategis Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

- a. Mengembangkan peraturan Zonasi Kawasan dengan potensi yang dimiliki, dimana selanjutnya akan diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Buleleng.
- b. Perlunya peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas dalam rangka pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.
- c. Perlu upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai melalui pendekatan sosial budaya guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan Tata ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.
- d. Permukiman kumuh yang semakin meluas, Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan permukiman yang tidak teratur, kumuh, tidak layak huni dan tidak sesuai dengan peraturan Tata Ruang.

5. Isu Strategis Bidang Penataan Bangunan dan Gedung

- a. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung;
- b. Belum memiliki Database Bangunan Gedung Daerah;
- c. Sebagian dari Perda BG sudah tidak sesuai dengan Peraturan-peraturan di atasnya;
- d. Masih kurangnya tenaga teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung;



- e. Belum memiliki peraturan/perencanaan yang mengatur kesesuaian antara bangunan dan lingkungannya.

B. Tugas dan Fungsi Dinas

- Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

- a. menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- e. merumuskan perencanaan, penatagunaan, pembangunan operasional dan pemeliharaan sumber daya air;
- f. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan;
- g. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pemeliharaan, dan pembangunan jembatan;
- h. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pembinaan prasarana air minum, drainase, air limbah dan persampahan;



- i. merumuskan pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang Kabupaten;
- j. merumuskan pelaksanaan penataan bangunan dan pembinaan bangunan gedung;
- k. merumuskan pelaksanaan pembinaan dan memonitor pemungutan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan pemakaian kekayaan daerah berupa sewa pemakaian alat berat dan jasa laboratorium Pekerjaan Umum;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- m. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta UPTD;
- n. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan, keprotokolanan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- o. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- p. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- q. mengkoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



- s. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - t. menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan data dan sistem informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - u. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau Lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
 - v. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - w. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - x. mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta pelaksanaan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - y. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - z. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sekrearis
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta UPTD;
 - e. mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan, ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan barang milik daerah/pemerintah, urusan surat menyurat, ketatalaksanaan, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



- f. mengkoordinasikan perumusan bahan penyusunan indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), pembangunan Zona Integritas (ZI), Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), Pengelolaan Pengaduan, Pengendalian Gratifikasi, Pengendalian Benturan Kepentingan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- h. mengkoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- j. merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- k. menyelenggarakan verifikasi, analisis, evaluasi, pengolahan data dan sistem informasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- n. mengkoordinasikan penyiapan bahan, penyusunan serta pelaksanaan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- o. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran/akhir tahun serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;



- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1 Sub Bagian Umum

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, berdasarkan data, program Sekretariat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan suratmenyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, kehumasan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- g. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, besetting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
- h. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
- i. menyusun dan melaksanakan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- j. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- k. menyusun Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- l. melaksanakan menyusun dokumen evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;



- n. menyusun dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang meliputi Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Umum
- o. Pengadaan (RUP), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT);
- p. melaksanakan dan menyusun laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- q. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- r. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sub Bagian Keuangan

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan, berdasarkan data dan program Sekretariat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi dokumen keuangan yang meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melaksanakan penyusunan laporan akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- g. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- h. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran/akhir tahun serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/keadaan;
- i. menyusun laporan capaian kinerja kegiatan;
- j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



3. Bidang Sumber Daya Air

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan survey serta pendataan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis di bidang sumber daya air;
- f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembangunan dan peningkatan sumber daya air;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan rehabilitasi sumber daya air;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan monitoring dan pengendalian terhadap pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pengamanan sarana dan prasarana sumber daya air;
- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengamanan, pemanfaatan dan pengendalian air permukaan dan atau sumber air lainnya;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi Upaya penanggulangan bencana banjir maupun serta usaha-usaha pengendalian abrasi pantai;
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Bina Marga

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Marga, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. merumuskan kebijaksanaan teknis, memberi bimbingan dan pembinaan di Bidang Bina Marga; mengawasi, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan;



- e. melakukan koordinasi dengan instansi lain yang menyangkut pemanfaatan ruang milik jalan;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
5. Bidang Cipta Karya
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Cipta Karya, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengaturan kebijakan, strategi dan teknis bidang Air Minum, Drainase dan Air limbah, dan Persampahan;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengumpulan data yang berkaitan dengan Kinerja Bidang Air Minum, Drainase dan Air Limbah, dan Persampahan;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis dan manajemen pengelolaan Air Minum, Drainase dan Air Limbah, dan Persampahan;
 - g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan
 - h. monitoring, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan optimalisasi, rehabilitasi dan pengembangan prasarana air minum;
 - i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, monitoring, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan kegiatan prasarana Drainase dan Air Limbah;
 - j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, monitoring, mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan kegiatan prasarana Persampahan
 - k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



6. Bidang Penataan Bangunan

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penataan Bangunan, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mentribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. menyusun kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- e. menganalisa data dan informasi terkait penyelenggaraan bangunan termasuk Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN);
- f. melaksanakan pendataan dan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara yang menjadi aset Pemerintah Daerah;
- g. memberikan bantuan teknis berupa informasi, advis, konsultasi, tenaga dan kegiatan percontohan kepada Perangkat Daerah atau instansi vertikal penyelenggaraan bangunan;
- h. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- i. menerima pelimpahan/pendelegasian pelaksanaan pembangunan bangunan Negara dari Pengguna Anggaran Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah;
- j. mengakomodir permintaan bantuan tenaga pengelola/pendamping teknis pembangunan Bangunan Negara dari perangkat daerah atau instansi vertikal penyelenggara bangunan;
- k. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- l. memberikan layanan rekomendasi/kajian teknis dalam pengajuan izin mendirikan bangunan gedung tidak sederhana dan atau fungsi khusus serta Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), yang diajukan dari perangkat daerah yang menangani Perizinan;
- m. membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dan Pengkaji Teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



7. Bidang Penataan Bangunan
 - a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi, berdasarkan data dan program Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan; mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - c. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - d. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program dan petunjuk teknis di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - f. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis dan sosialisasi di Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kawasam Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, yang dilakukan melalui tahapan :

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai proses tersebut
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan



kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

Dilihat dari rancangan akhir RKPD Tahun 2024 sebesar Rp. 97,456,705,516,- maka seluruh kebutuhan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng diadopsi dalam rancangan akhir RKPD ini. Namun demikian apabila terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang berdampak pada peningkatan laju inflasi serta adanya perubahan kebijakan strategis Kepala Daerah maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan termasuk didalamnya alokasi anggaran.



Tabel 2.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng

		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp)
				Volume	Satuan					Volume	Satuan	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.163.062.081	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.163.062.081
1.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				285.083.840	1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				285.083.840
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	146.211.360	Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	146.211.360



	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	138.872.480		Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	138.872.480
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				14.448.206.536		2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				14.448.206.536
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177	Orang/Bulan	14.114.050.316		Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Buleleng	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177	Orang/Bulan	14.114.050.316
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	100.527.120		Sub. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Dokumen	100.527.120
	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	233.629.100		Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	233.629.100
3.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				26.639.880		3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				26.639.880
	Sub. Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	26.639.880		Sub. Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	26.639.880
4.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				177.599.525		4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Buleleng				177.599.525
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000		Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000



	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan Kantor yang disediakan			5.000.000		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah peralatan Kantor yang disediakan			5.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	90.000.000		Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	90.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000		Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	1	Paket	1.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	1.000.000		Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	1.000.000
	Sub. Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	Laporan	10.000.000		Sub. Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6	Laporan	10.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	60.599.525		Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	60.599.525
5.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Buleleng				90.000.000	5.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Buleleng				90.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	30.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	30.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	50.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Buleleng	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	50.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	10.000.000		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kabupaten Buleleng	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	10.000.000



6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng				719.208.952	6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng				719.208.952
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	68.458.080		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	68.458.080
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	241.541.920		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	241.541.920
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	68.507.792		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	68.507.792
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	Laporan	340.701.160		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Buleleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	Laporan	340.701.160
7.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng				416.323.348	7.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Buleleng				416.323.348
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	59.000.000		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	59.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kabupaten Buleleng	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100	Unit	343.607.860		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kabupaten Buleleng	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100	Unit	343.607.860



	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	13.715.488		Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Buleleng	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	13.715.488
PROGRAM PENGELOLAAN SUM BER DAYA AIR (SDA)						3.891.933.984	PROGRAM PENGELOLAAN SUM BER DAYA AIR (SDA)						3.891.933.984
1.	Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				34.052.821		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				34.052.821
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	34.052.821		Sub. Kegiatan : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	34.052.821
2.	Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				3.857.881.163		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				3.857.881.163
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,3	KM	125.682.382		Sub. Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,3	KM	125.682.382
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Bendung Irigasi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1	Bendung	2.000.000		Sub. Kegiatan : Peningkatan Bendung Irigasi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1	Bendung	2.000.000
	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,3	KM	2.927.028.403		Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,3	KM	2.927.028.403
	Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,3	KM	298.960.000		Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,3	KM	298.960.000



	Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	249	Bendung	504.210.378		Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	249	Bendung	504.210.378
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1.983.869.708	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						1.983.869.708
1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				1.983.869.708	1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				1.983.869.708
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Dokumen	5.000.000		Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Dokumen	5.000.000
	Sub. Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	Liter/Detik	1.880.446.626		Sub. Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Buleleng	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	Liter/Detik	1.880.446.626
	Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15	Kelompok Masyarakat	93.423.082		Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15	Kelompok Masyarakat	93.423.082
	Sub. Kegiatan : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kabupaten Buleleng	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	15	Penyelenggaraan SPAM	5.000.000		Sub. Kegiatan : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Kabupaten Buleleng	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	15	Penyelenggaraan SPAM	5.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						3.295.903.040	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						3.295.903.040



1.	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng				3.295.903.040	1.	Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng				3.295.903.040
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000		Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000
	Sub. Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3 R/TPS	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100	Rumah Tangga	3.285.903.040		Sub. Kegiatan : Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3 R/TPS	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100	Rumah Tangga	3.285.903.040
	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3 R/TPS	Kabupaten Buleleng	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1	Unit	5.000.000		Sub. Kegiatan : Rehabilitasi TPA/TPST /SPA/TPS-3 R/TPS	Kabupaten Buleleng	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	1	Unit	5.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						6.174.542.080	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						6.174.542.080
1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota	Kabupaten Buleleng				6.174.542.080	1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota	Kabupaten Buleleng				6.174.542.080
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000		Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000



	Sub Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Buleleng	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	Orang	5.000.000		Sub Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Buleleng	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	100	Orang	5.000.000
	Sub. Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100	Rumah Tangga	4.505.000.000		Sub. Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100	Rumah Tangga	4.505.000.000
	Sub. Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	100	Rumah Tangga	1.505.000.000		Sub. Kegiatan : Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	100	Rumah Tangga	1.505.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	200	Rumah Tangga	154.542.080		Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	200	Rumah Tangga	154.542.080
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.808.344.032	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.808.344.032
1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				1.808.344.032		1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng			1.808.344.032
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000		Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000



	Sub. Kegiatan : Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	10000	M	5.000.000		Sub. Kegiatan : Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Kabupaten Buleleng	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	10000	M	5.000.000
	Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kabupaten Buleleng	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	15	Kawasan	1.798.344.032		Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Kabupaten Buleleng	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	15	Kawasan	1.798.344.032
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						351.894.955	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						351.894.955
1.	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten Buleleng				351.894.955	1.	Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten Buleleng				351.894.955
	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Buleleng	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	360	Dokumen	124.881.168		Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Buleleng	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	360	Dokumen	124.881.168
	Sub. Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	131.284.512		Sub. Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	131.284.512
	Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	2.400.475		Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	2.400.475



	Sub. Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	93.328.800		Sub. Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	93.328.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						62.942.192.356		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					62.942.192.356
1.	Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				62.942.192.356		1. Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				62.942.192.356
	Sub. Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen			Sub. Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	1	Dokumen	
	Sub. Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen	81.376.320		Sub. Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten Buleleng	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2	Dokumen	81.376.320
	Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7	KM	148.027.200		Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7	KM	148.027.200
	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4	KM	60.108.101.760		Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4	KM	60.108.101.760
	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3	KM	2.601.687.076		Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	3	KM	2.601.687.076
	Sub. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dibangun	200	M	-		Sub. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dibangun	200	M	-
	Sub. Kegiatan : Penggantian Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1	M	1.000.000		Sub. Kegiatan : Penggantian Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	1	M	1.000.000



	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	M	1.000.000		Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	M	1.000.000
	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100	M	1.000.000		Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Buleleng	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	100	M	1.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						159.926.208		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					159.926.208
1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Buleleng				4.000.000		1 Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Buleleng				4.000.000
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	Orang	2.000.000		Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	Orang	2.000.000
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	Orang	2.000.000		Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	Orang	2.000.000
2	Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	9	Kecamatan	155.926.208		2 Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Buleleng		9	Kecamatan	155.926.208
	Sub. Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	155.926.208		Sub. Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	155.926.208
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Kabupaten Buleleng				665.037.072		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kabupaten Buleleng				665.037.072



1.	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				233.232.016	1.	Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				233.232.016
	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	127.284.032		Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	127.284.032
	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	104.947.984		Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	104.947.984
	Sub. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	Dokumen	1.000.000		Sub. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1	Dokumen	1.000.000
2.	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				335.986.848	2.	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				335.986.848
	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	60.735.968		Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	60.735.968
	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2	Dokumen	275.250.880		Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2	Dokumen	275.250.880



3.	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				95.818.208	3.	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				95.818.208
	Sub. Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	Dokumen	95.818.208		Sub. Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12	Dokumen	95.818.208
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						20.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA						20.000.000
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				20.000.000	1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng				20.000.000
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20.000.000		Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1	Dokumen	20.000.000



2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disyahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat desa sampai Musrenbang tingkat kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum OPD berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng.

Tabel 2.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
Tahun 2024

No	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Penyelenggaraan Jalan	Kabupaten Buleleng				
	Penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Paket	68	Satuan dipakai paket karena tidak semua usulan ruas mencantumkan volume pekerjaan
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kabupaten Buleleng				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase Akses Air Minum Perdesaan	Paket	10	Satuan dipakai paket karena tidak semua usulan ruas mencantumkan volume pekerjaan
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kabupaten Buleleng				



	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase pembangunan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	Pembangunan TPS3R
D	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kabupaten Buleleng				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	Unit	-	Penyediaan Tangki Septic Skala Individual
E	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Buleleng				
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Persentase Sistem Drainase yang efektif	M	51200	Saluran Drainase Kabupaten
F	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kabupaten Buleleng				
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Buleleng	Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik	Paket	9	Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BULELENG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam RPJMN 2020-2024 dimana terdapat 7 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional diantaranya yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Agenda Pembangunan Nasional tersebut dalam pelaksanaan pembangunannya, difokuskan atau diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan daya ungkit besar terhadap pembangunan nasional serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur masuk dalam agenda nomor 5 (lima) yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yang dapat dijabarkan dalam 9 (Sembilan) program prioritas yang meliputi

1. Program Pengelolaan Sum Ber Daya Air (SDA) yang bergerak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan Irigasi
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang menangani penyediaan air bersih dan akses air minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional yang mana program bergerak dalam pembangunan infrastruktur TPS3R



4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang bergerak dalam penyediaan sanitasi
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase bergerak dalam pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong kewenangan kabupaten
6. Program Penataan Bangunan Gedung memiliki fungsi dalam pembangunan kantor/Gedung negara serta penerbitan rekomendasi teknis Persetujuan Bangunan Gedung
7. Program Penyelenggaraan Jalan yang bergerak dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi bergerak dalam bidang jasa konstruksi baik itu pelatihan dan sertifikasi tenaga jasa konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang bergerak dalam bidang ke tata ruangan yang bertujuan untuk mengatur polar ruang daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng selama lima tahun.

Sesuai dengan bidang urusan yang ditangani, tujuan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng yaitu :

Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah yang sesuai dengan pemanfaatan ruang untuk pemenuhan pelayanan public

Sasaran :

- 1. Terwujudnya Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum yang layak dan berkelanjutan**
- 2. Terwujudnya pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.**



Sedang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buleleng beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Terwujudnya peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Layak dan Berkelanjutan	Persentase Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dalam Kondisi yang Representatif	Persentase Kondisi Jalan dan Jembatan Mantap	71,2	72	73	74	75
			Panjang Sistem Irigasi Sekunder Kabupaten dalam kondisi baik	78,24	78,56	79	79,5	80
			Persentase Akses Air Minum Perdesaan	86,74	87	88,5	89	89,5
			Persentase pembangunan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Daerah Kabupaten/Kota	37,21	41,86	46,51	51,16	55,81



		Persentase Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten	94	94,46	94,56	94,66	94,76
		Persentase Panjang Saluran Drainase dalam kondisi baik	47,67	48,27	48,88	49,48	50,09
		Jumlah permohonan PBG dan SLF yang diterbitkan	100	100	100	100	100
		Persentase Dokumen RTBL	0	100	100	100	100
Terwujudnya Pembangunan di Kabupaten Buleleng sesuai Dengan Tata Ruang	Terwujudnya Penyesuaian Penataan Ruang	Persentase Masyarakat Jasa Konstruksi yang terampil	100	100	100	100	100
		Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	60	70	75	80	85



3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2.



Tabel 3.2
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
 Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER DANA						
						PAD	DAU UMUM	BHP	DAK IRIGASI	DAU PU	DAU KESEHATAN	DID
						9.362.627.353	8.009.363.496	49.827.318.067	2.818.056.000	19.488.563.000	7.750.777.600	200.000.000
PAGU					97.456.705.516	9.362.627.353	8.009.363.496	49.827.318.067	2.818.056.000	19.488.563.000	7.750.777.600	200.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				16.163.062.081							
1.	<i>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				285.083.840							



	Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah	9	Dokumen	146.211.360	116.211.360	30.000.000					
	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	138.872.480	108.872.480	30.000.000					
2.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.448.206.536							
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	177	Orang/Bu lan	14.114.050.316	6.304.686.820	7.809.363.496					
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administras i Pelaksanaa	6	Dokumen	100.527.120	100.527.120						



		n Tugas ASN										
	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	233.629.100	233.629.100						
3.	<i>Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>				26.639.880							
	Sub. Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	26.639.880	26.639.880						
4.	<i>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>				177.599.525							
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000		10.000.000					



	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000		5.000.000					
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	90.000.000		90.000.000					
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1	Paket	1.000.000		1.000.000					
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	5	Dokumen	1.000.000		1.000.000					
	Sub. Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	10.000.000		10.000.000					
	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	60.599.525	60.599.525						



5.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.000.000							
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	30.000.000		23.000.000	7.000.000				
	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1	Unit	50.000.000			50.000.000				
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	10.000.000			10.000.000				
6.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				719.208.952							
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	68.458.080	68.458.080						



	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	241.541.920			241.541.920				
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Laporan	68.507.792	66.507.792		2.000.000				
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29	Laporan	340.701.160	334.701.160		6.000.000				
7.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				416.323.348							
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	3	Unit	59.000.000			59.000.000				



		dibayarkan Pajak dan Perizinannya										
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100	Unit	343.607.860	338.607.860		5.000.000				
	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	13.715.488			13.715.488				
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.891.933.984							
1.	<i>Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				34.052.821							



	Sub. Kegiatan : Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokumen	34.052.821	29.052.821	5.000.000					
2.	<i>Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3.857.881.163							
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0,3	KM	125.682.382	123.682.382	2.000.000					
	Sub. Kegiatan : Peningkatan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	1	Bendung	2.000.000		2.000.000					
	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,3	KM	2.927.028.403	108.972.403		2.818.056.000				



	Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0,3	KM	298.960.000	298.960.000						
	Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	249	Bendung	504.210.378	499.210.378		5.000.000				
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.983.869.708							
1.	<i>Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</i>				1.983.869.708							
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1	Dokumen	5.000.000			5.000.000				



	Sub. Kegiatan : Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	12	Liter/Desa	1.880.446.626			180.446.626		1.700.000.000		
	Sub. Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang menyelenggarakan SPAM yang Terbina dan Terawasi	15	Kelompok Masyarakat	93.423.082	93.423.082						
	Sub. Kegiatan : Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkatkan kinerjanya	15	Penyelenggaraan SPAM	5.000.000			5.000.000				
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					3.295.903.040							
1.	<i>Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Buleleng</i>				3.295.903.040							



1.	Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupate/Kota				6.174.542.080							
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000			5.000.000				
	Sub Kegiatan : Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaa n Air Limbah Domestik	100	Orang	5.000.000			5.000.000				
	Sub. Kegiatan : Pembangunan/Penyed iaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	100	Rumah Tangga	4.505.000.000			5.000.000			4.500.000.00 0	
	Sub. Kegiatan : Pembangunan/Penyed iaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambun g dengan Sistem Pengelolaa n Air Limbah	100	Rumah Tangga	1.505.000.000			5.000.000		1.500.000.000		



		Terpusat Skala Permukiman										
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	200	Rumah Tangga	154.542.080	154.542.080						
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					1.808.344.032							
1.	<i>Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>				1.808.344.032							
	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1	Dokumen	5.000.000			5.000.000				



	Sub. Kegiatan : Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	10000	M	5.000.000			5.000.000				
	Sub. Kegiatan : Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	liat lkpj	M	1.798.344.032			1.798.344.032				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					351.894.955							
1.	<i>Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</i>				351.894.955							
	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG),	360	Dokumen	124.881.168	124.881.168						



	Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG										
	Sub. Kegiatan : Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	131.284.512	126.284.512		5.000.000				
	Sub Kegiatan : Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota yang Disusun	1	Dokumen	2.400.475			2.400.475				
	Sub. Kegiatan : Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	93.328.800			93.328.800				



PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					62.942.192.356							
1.	<i>Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</i>				62.942.192.356							
	Sub. Kegiatan : Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaa n Leger Jalan	1	Dokumen								
	Sub. Kegiatan : Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jemb atan	2	Dokumen	81.376.320			81.376.320				
	Sub. Kegiatan : Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruk si Jalan	7	KM	148.027.200			148.027.200				
	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilita si	4	KM	60.108.101.760			43.819.538.760		16.288.563.000		



	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemelihara an Secara Rutin	3	KM	2.601.687.076			2.601.687.076				
	Sub. Kegiatan : Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	200	M	-							
	Sub. Kegiatan : Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantia n	1	M	1.000.000	1.000.000						
	Sub. Kegiatan : Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	1	M	1.000.000	1.000.000						
	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemelihara an Secara Rutin	100	M	1.000.000	1.000.000						
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					159.926.208							



1	Kegiatan : Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				4.000.000							
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	Orang	2.000.000	2.000.000						
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifika si	50	Orang	2.000.000	2.000.000						
2	Kegiatan : Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				155.926.208							



	Sub. Kegiatan : Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan	155.926.208			155.926.208				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					665.037.072							
1.	<i>Kegiatan : Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>				233.232.016							
	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	127.284.032			127.284.032				



	Sub. Kegiatan : Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peretujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	104.947.984			104.947.984				
	Sub. Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang - undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan ruang	1	Dokumen	1.000.000	1.000.000						
2.	Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				335.986.848							
	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	60.735.968			60.735.968				



	Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusuna n RRTR Kabupaten/ Kota	2	Dokumen	275.250.880			75.250.880				200.000.000
3.	<i>Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i>				95.818.208							
	Sub. Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaa n Penataan Ruang	12	Dokumen	95.818.208			95.818.208				
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					20.000.000							
1.	<i>Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</i>				20.000.000							



	Sub. Kegiatan : Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	1	Dokumen	20.000.000	1.051.910		18.948.090				
					97.456.705.516							



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2024 disajikan pada tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Tahun anggaran 2024

NO	KODE	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TANGGAL AWAL PELAKSANAAN	TANGGAL AKHIR PELAKSANAAN	ESTIMASI JUMLAH MANUSIA SAMA SAMA TAHUN 2024	KAPASITAS FINANSIAL DAN MANUSIA PERLOMBAAN					KELUARAN BUDGET	REKONSILIASI SALDO BUKU TAHUN 2024		REKONSILIASI SALDO PERLOMBAAN 2024
							TARGET ORG	PROGNOSE RPT RUM	LOKASI	BUDGET DANA	PERSEKORAN		PERSEKORAN	PERIODI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		REKONSILIASI SALDO BUKU TAHUN 2024													
		REKONSILIASI SALDO PERLOMBAAN 2024													
		REKONSILIASI SALDO PERLOMBAAN 2024													
1	10001	Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng	Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja				100%	100%							
	10001.01	Kelembagaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas manajemen	Kelembagaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas manajemen				100%	100%							
	10001.01.001	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							
	10001.01.001.01	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							
	10001.01.001.01.001	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							
	10001.01.001.01.001.001	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							
	10001.01.001.01.001.001.001	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							
	10001.01.001.01.001.001.001.001	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							
	10001.01.001.01.001.001.001.001.001	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi	Kelembagaan dan Pengembangan Organisasi				100%	100%							



No	Kode	Uraian Kegiatan Sesuai dengan Rencana Kerja Kabupaten	Indikator Program Kegiatan dan Sasaran	Target Kuantitas Kegiatan (2024)	Tahun Kegiatan Kegiatan (2024-2024)	Masa Jangka Kegiatan (2024-2024)	LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM						Kategori Kegiatan	TAMBAHAN KEGIATAN TAHUN 2024		Keterangan Kegiatan Kegiatan	
							Target 2024	Pencapaian (%)	Ciri-ciri	Kendala	Peningkatan			Target 2024	Pencapaian (%)		
											Strategis	Operasional					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1001-01-001		Program Kerja															
1001-01-002		Program Kerja															
1001-01-003		Program Kerja															
1001-01-004		Program Kerja															
1001-01-005		Program Kerja															
1001-01-006		Program Kerja															
1001-01-007		Program Kerja															
1001-01-008		Program Kerja															
1001-01-009		Program Kerja															
1001-01-010		Program Kerja															



No	Kode	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tipe Kegiatan	Mula-mula (Januari 2024)	Penyelesaian (Desember 2024)	Tahapan Kegiatan dan Estimasi Perkiraan						Kategori Kegiatan	Pembangunan / Pemeliharaan		Terdapat dalam Rencana Kerja	
							Januari	Februari	Maret	April	Mei	Jun		Agustus	September		Oktober
1																	
Kategori 1: Kegiatan Operasional																	
2	1000	Pembinaan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Pembinaan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum														
1000.01		Pembinaan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum	Pembinaan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum														
Kategori 2: Kegiatan Pembangunan																	



No	Kode	JURAN / KEMENTERIAN / LEMBAGA / UNIT PELAKSANA	DESKRIPSI PROGRAM / KEGIATAN / JASAR	TARUJ / WAKTU / BUDGET / RENCANA / LOKASI	PILIHAN / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI	INDIKATOR / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI	LOKASI/REKOR / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI				KEMENTERIAN / LEMBAGA / UNIT PELAKSANA	INDIKATOR / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI		REKOR / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI
							TARUJ / WAKTU / BUDGET / RENCANA / LOKASI	PILIHAN / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI	INDIKATOR / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI	INDIKATOR / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI		TARUJ / WAKTU / BUDGET / RENCANA / LOKASI	PILIHAN / KEGIATAN / RENCANA / LOKASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			...											
Kategori: ...														
			...											
1	1.001
	1.001.01
Kategori: ...														
			...											
Kategori: ...														
			...											
2	2.001
	2.001.01
Kategori: ...														



NO	KODE	NAMA KEGIATAN (KATEGORI KEGIATAN DAN SUBKATEGORI)	INDUKSI PROGRAM (KATEGORI DAN SUBKATEGORI)	TANGGAL AWAL KEGIATAN (DD)	TANGGAL AKHIR KEGIATAN (DD)	LOKASI (KABUPATEN BULELENG)	DASAR HUKUM DAN KEANGGARAN PEKERJAAN						WILAYAH KAWASAN	REKAMBUKALU TAHUNAN (TAHUN 2024)		PERSYARATAN PELAKSANAAN (KETERANGAN)
							TANGGAL DPM	PERATURAN DAERAH	PERANGKAT	KEMERIAH HAK	PERENCANAAN			TANGGAL	PILIHAN KEGIATAN	
											INDUKSI	DAFTAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.01.01	PEKERJAAN PERSIAPAN KAWASAN (KAWASAN)	Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT							10000000000	
	1.01.01.01	Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					1997/1	PERANGKAT							10000000000	Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
1.01.01.01.01 Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)																
			Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT	Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)	Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					10000000000	Keperluan Pekerjaan Persiapan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
2	1.01.02	PEKERJAAN PERAWATAN (KAWASAN)	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT							10000000000	
	1.01.02.01	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					1997/1	PERANGKAT							10000000000	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
1.01.02.01.01 Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)																
			Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					10000000000	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
3	1.01.03	PEKERJAAN PERAWATAN (KAWASAN)	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT							10000000000	
	1.01.03.01	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					1997/1	PERANGKAT							10000000000	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
1.01.03.01.01 Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)																
			Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					10000000000	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
4	1.01.04	PEKERJAAN PERAWATAN (KAWASAN)	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT							10000000000	
	1.01.04.01	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					1997/1	PERANGKAT							10000000000	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)
1.01.04.01.01 Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)																
			Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)				1997/1	PERANGKAT	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)					10000000000	Keperluan Pekerjaan Perawatan Pekerjaan (Kategori Pekerjaan)



NO	KODE	JENIS KEGIATAN SERTA POKOK KENDALA YANG DIPERALOKASI	MELAKUKAN KEGIATAN SERTA TUNJUK KINERJA	LOKASI KEGIATAN PADA TAHUN 2024	MELAKUKAN KEGIATAN PADA TAHUN 2024	MELAKUKAN KEGIATAN PADA TAHUN 2024	LAKSANAAN DAN/ATAU PERENCANAAN						KELOMPOK SARANA	WAKTU DAN PERANGKAT (MATERI)		PENGALIHAN SUMBER PENDANAAN (JAWAB)	
							LOKASI	WAKTU	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT	PERANGKAT		PERANGKAT	PERANGKAT		PERANGKAT
Kategori 1: ...																	
Kategori 2: ...																	
Kategori 3: ...																	
Kategori 4: ...																	



BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemimpin manajemen dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa mendatang.

Demikian paparan kami, mengenai Program Rencana Kerja Dinas dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng tahun 2024, semoga bisa kita cermati bersama bahwa memberdayakan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh komponen pembangunan termasuk masyarakat didalamnya, untuk senantiasa bersama-sama mendukung seluruh program dan kegiatan pemerintah melalui peran sertanya dalam pembangunan Buleleng ke depan menuju Buleleng Smile dengan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Singaraja, 23 Juni 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng



I Putu Adiptha Ekaputra, ST., MM

NIP. 19740610 200003 1 009